



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. DISHUB yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Kerja Dinas meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan, yang membawahi Seksi Lalu Lintas Jalan, Seksi Pengujian Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Prasarana, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, Seksi Pengoperasian Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang membawahi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan dan Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB III PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 155

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 155 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strageis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja- PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

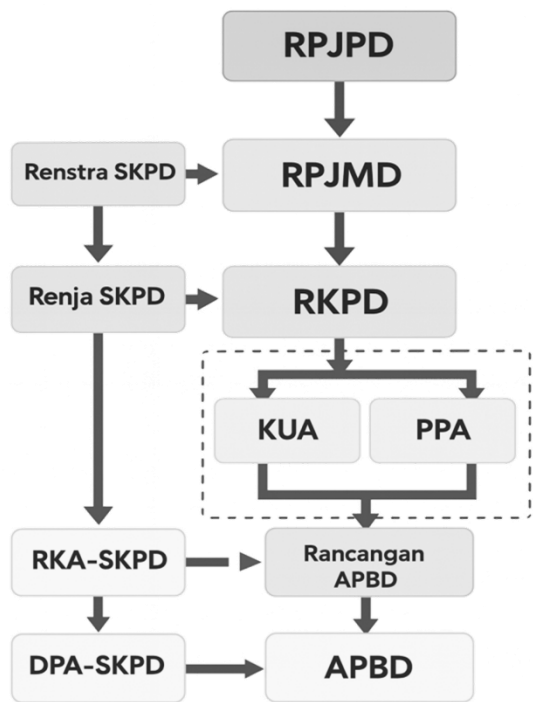
- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan proses:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:
 - a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra- PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra- PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala PD dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
 - a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala PD untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. PD diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan

- rancangan awal RKPD;
- g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, PD menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala PD;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada PD.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan PD.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:
- a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala PD untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi yang dilakukan PD, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;
 - d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, PD menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi PD;

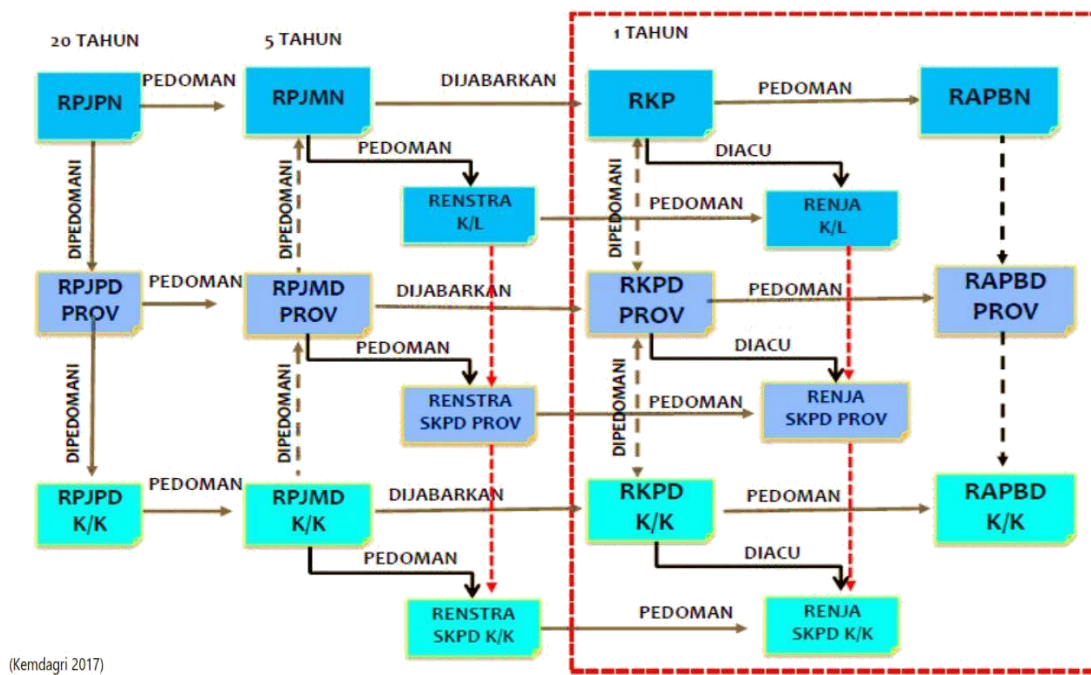
- e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala PD.
- f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
- g. PD menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja- PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-PD ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja PD ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD selama tahun 2024.

Pada tahun 2024, Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 5.879.217.915,- Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 5.735.234.080,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,55% dari total anggaran pada tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Dinas Perhubungan pada APBD murni adalah sebesar Rp.7.948.597.528,- untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Sebagai tindaklanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun Anggaran 2025, dilaksanakan efisiensi atas beberapa belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 sehingga total pagu anggaran Tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 7.875.899.910. Sementara pagu Dinas Perhubungan pada APBD Perubahan 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.420.673.601,- dimana Capaian realisasi keuangan dan kinerja diharapkan dapat melebihi tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU PD Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD
Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja PD	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	BB	B	89,68
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	85,90	90,30	105,12

Sementara capaian atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian tahun 2025 (tahun berjalan) disajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Urusan Wajib									
		Bidang Urusan Perhubungan									
	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan	dok	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	2	2	2	2	2	100
	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	lap	1	1	1	1	1	1	100
	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keuangan PD								
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	51	51	51	39	53	53	100
	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dok	3	3	3	3	3	3	100
	1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	1	1	1	1	100
	1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	lap	3	3	3	3	3	3	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Triwulanan / Semesteran SKPD								
	1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A
	1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD								
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan tahun n	Paket	4	4	4	4	4	4	100
	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan tahun n	paket	2	2	2	2	2	2	100
	1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tahun n	dok	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara-raan Rapat Koordinasi dan	lap	24	24	24	24	24	24	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Konsultasi SKPD yang disusun tahun n								
	1.3.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis yang disusun tahun n	dok	6	6	6	6	6	6	100
	1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD								
	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1000	1000	1000	820	1000	1000	100
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	lap	4	4	4	4	4	4	100
	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lap	12	12	12	12	12	12	100
	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	3	3	3	3	3	3	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD								
	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	10	10	10	10	10	100
	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	4	4	4	4	4	4	100
	2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLJA								
	2.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan								
	2.1.1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	25	70	25	13	25	25	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	1	1	1	1	1	1	100
	2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia								
	2.2.1	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	1	1	1	1	1	100
	2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan								
	2.3.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	dok	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala								
	2.4.1	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1	100
	2.4.2	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	unit	5564	3683	5614	3707	5664	5664	100
	2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang disusun								
	2.5.1	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	lap	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan								
	2.6.1	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dok	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.7.1	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kotadalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	laporan	342	24	342	24	342	342	100
	2.8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum								
	2.8.1	- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	dok	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota								
	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran (%)								
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penetapan lintas penyeberangan dan pengoperasian kapal yang disusun								
		- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dok	N/A	N/A	1	1	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renja PD sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dimana tahun sebelumnya telah melaksanakan 3 (tiga) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2024 dan rencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kabupaten Sumbawa

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun				Realisasi Tahun			Rencana Realisasi Tahun
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP PD Dinas Perhubungan	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	BB
2.	Rasio Konektivitas Kabupaten	85,40	85,65	85,90	91	87,10	87,10	90,30	91

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja serta evaluasi terhadap proses bisnis kelembagaan, teridentifikasi beberapa permasalahan yang berdampak pada efektivitas PD dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja. Ini merupakan permasalahan hasil (*outcome*) yang paling krusial, ditandai oleh menurunnya kategori nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari kategori BB menjadi B pada tahun 2024.
2. Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2024 mencapai 90,30%, capaian ini sudah cukup baik namun masih membutuhkan strategi untuk mencapai target pada periode renstra berikutnya sehingga dapat mencapai 100%,

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan titik awal dalam merumuskan strategi dan kebijakan PD pada periode 2025–2029, serta menjadi dasar dalam menyusun tujuan, sasaran, dan program prioritas. Dalam menetapkan Isu Strategis PD tidak hanya bersifat internal, tetapi juga relevan, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah secara makro. Berikut ini adalah isu strategis PD sesuai hasil analisis:

1. Kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.
2. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Belum Optimal.
3. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan belum optimal.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 tersebut ditetapkan setelah melalui proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang dilakukan adalah melakukan pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 khususnya yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Reviu Rancangan Awal dan Hasil Analisis RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP-ASN Dinas Perhubungan	77 Poin	2.425.000,00	IP-ASN Dinas Perhubungan	77 Poin	2.425.000,00
Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	2 Orang	2.425.000,00	Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	2 Orang	2.425.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.700.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.700.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	725.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	725.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5%	5,000,000	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5%	5,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan yang disusun	1 Dokumen	7,895,310,675	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan yang disusun	1 Dokumen	7,895,310,675
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	166,546,150	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	166,546,150
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	74,16	5.395.249.040	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	74,16	5.395.249.040
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	7 Dokumen	32.806.950,00	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	7 Dokumen	32.806.950,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	16.119.500,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	16.119.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.050,00	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.050,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.557.400,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.557.400,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 Dokumen	3.156.500,00	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.156.500,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SKPD			Dokumen DPA-SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.404.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.404.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.397.500,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.397.500,00
Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Laporan	5.862.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Laporan	5.862.000,00
Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	5 Dokumen	4.784.617.790,00	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	5 Dokumen	4.784.617.790,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	4.665.209.790,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	4.665.209.790,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	113.308.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	113.308.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.300.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.300.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.750.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.750.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	3 Laporan	2.050.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	3 Laporan	2.050.000,00
Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	3 Dokumen	291.614.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	3 Dokumen	291.614.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	138.085.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	138.085.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.702.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.702.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	827.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	827.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	4 Paket	145.954.500,00	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	4 Paket	145.954.500,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	49.775.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	49.775.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36.600.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36.600.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.114.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.114.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	58.465.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	58.465.000,00
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	2 Dokumen	135.980.800,00	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	2 Dokumen	135.980.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	9.800.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	9.800.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	126.180.800,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	126.180.800,00
Program Penyelenggaraan LLAJ	Konektivitas Darat	66,20	2.979.209.200,00	Konektivitas Darat	66,20	2.979.209.200,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	250 Unit	1.957.433.500,00	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	250 Unit	1.957.433.500,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 Unit	1.918.738.500,00	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 Unit	1.918.738.500,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	38.695.000,00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	38.695.000,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	75%	1.255.000,00	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	75%	1.255.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1.255.000,00	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1.255.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dokumen	253.200.000,00	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dokumen	253.200.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	253.200.000,00	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	253.200.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	100%	115.050.000,00	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	100%	115.050.000,00
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5664	57.000.000,00	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5664	57.000.000,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5564	51.725.000,00	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5564	51.725.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	6.325.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	6.325.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1.250.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1.250.000,00
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Dokumen	1.250.000,00	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Dokumen	1.250.000,00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun	1 Dokumen	643.942.700,00	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun	1 Dokumen	643.942.700,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	643.942.700,00	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	643.942.700,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	64 Dokumen	1.075.000,00	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	64 Dokumen	1.075.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	1.075.000,00	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	1.075.000,00
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	1 Dokumen	6.003.000,00	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	1 Dokumen	6.003.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.003.000,00	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.003.000,00
Program Pengelolaan Pelayanan	Konektivitas Laut	25,80%	89.525.000,00	Konektivitas Laut	25,80%	89.525.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	1 Dokumen	425.000,00	Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	1 Dokumen	425.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	425.000,00	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	425.000,00
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	1 Dokumen	89.100.000,00	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	1 Dokumen	89.100.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.100.000,00	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.100.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang menjadi perhatian PD adalah dalam hal meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang, dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan musrenbang tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan yang dihasilkan melalui musrenbang menjadi masukan dan tanggungjawab PD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan unsur perencanaan untuk mengawal hasil musrenbang agar dapat diakomodir didalam rencana kerja SKPD teknis. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, PD telah memfasilitasi penyampaian usulan program dan kegiatan yang di sampaikan mulai dari tahapan musyawarah tingkat desa/kelurahan, musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, pembahasan melalui forum SKPD hingga pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut dilakukan inventarisasi dan pengkajian terkait kesesuaian dengan program prioritas dan isu-isu strategis daerah.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. RPJMN 2025–2029 adalah tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menjadi fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan menjadi pedoman utama pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. RPJMN 2025–2029 merupakan tahap transformatif yang menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global dan domestik. Fokusnya adalah memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun fondasi ekonomi hijau dan digital.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu : 1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemberantasan Kemiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan

penyediaan obat untuk rakyat 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Tahun 2026 adalah tahun kedua implementasi RPJMN 2025-2029, yang berfokus pada Penguatan Transformasi sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. RKP 2026 akan menjabarkan prioritas tahunan dari RPJMN tersebut. RKP 2026 yang disusun oleh Bappenas mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memiliki pesan utama yaitu meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air; mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing; serta menjamin inklusivitas pembangunan agar seluruh warga negara termasuk kelompok rentan mendapat manfaat nyata dari pembangunan. RKP 2026 berfungsi sebagai landasan kebijakan nasional dan daerah, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga serta menjadi dasar penyusunan APBN 2026.

Gambar 3.1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026
(Kementerian PPN/Bappenas, 2025)



Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas serta RKP 2026. Implementasi pelaksanaan peran strategis Dinas Perhubungan dalam mendukung kebijakan nasional diupayakan melalui pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan sebagai: 1). perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; 2). Pelaksanaan administrasi/penatausahaan dinas; 3). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; 4). pelaksanaan fungsi lain yang dieberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran PD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dalam Rencana Kerja (Renja) adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Sumbawa merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja PD setiap tahunnya. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2026
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas	0,92
		Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Persentase ketersediaan prasarana transportasi darat	35%
			Persentase ketersediaan prasarana	83%

			transportasi laut	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan	Kategori AKIP Dinas Perhubungan	BB
			Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Sedang
			Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Perhubungan pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan program yang dilaksanakan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”* serta pelaksanaan misi ketiga RPJMD yaitu *“Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul”*. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

Disamping memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan Prioritas Nasional baik yang tertuang didalam RPJMN 2025-2029 dan RKP Nasional

Tahun 2026, yaitu antara lain:

- a. Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi;
 - Swasembada pangan, energi dan air.
 - Peningkata kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, gizi).
 - Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA.
- b. Penguatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi, penguatan Satu data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Singkronisasi program dan pembiayaan pembangunan/singkronisasi desain pembiayaan untuk program prioritas (APBD/APBN/KPBU/CSR);
- d. Percepatan Pengentasan kemiskinan;
- e. Mendorong Adopsi Teknologi dan Inovasi (terutama pangan, pertanian dan industri);
- f. Menciptakan iklim investasi yang kuat melalui deregulasi dan kepastian hukum;
- g. Pertahanan Semesta melalui penguatan kemampuan teritorial;

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 berjumlah 3 (tiga) program, yaitu Program Penyelenggaraan LLAJ, Program Pengelolaan Pelayaran serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan dan sub kegiatan dalam program-program Tahun 2026 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Adapun total anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 adalah Rp. 8.463.983.240 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan jumlah dan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tertuang dalam tabel 3.2 dan 3.3 berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Pagu	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan LLAJ	2.979.209.200	8 Kegiatan	11 Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Pelayaran	89.525.000	2 Kegiatan	2 Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.395.249.040	7 Kegiatan	24 Sub Kegiatan

Tabel 3.3. Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Bapperida Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1	2
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PD
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja PD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan PD
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.15.01.2.06	Administrasi Umum PD
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.15.02	Program Penyelenggaraan LLAJ
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0011	abilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1	2
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usah
2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja PD Sumbawa Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya serta indikasi anggaran, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencanan Tahun 2026		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IP-ASN Dinas Perhubungan	77 Poin	2.425.000,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	2 Orang	2.425.000,00	
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	725.000	Dana Alokasi Umum
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5%	5,000,000	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan yang disusun	1 Dokumen	7,895,310,675	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	166,546,150	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	74,16	5.395.249.040	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	7 Dokumen	32.806.950,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	16.119.500,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.050,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.557.400,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.156.500,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.404.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.397.500,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencanan Tahun 2026		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1 Laporan	5.862.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	5 Dokumen	4.784.617.790,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	4.665.209.790,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	113.308.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	3 Laporan	2.050.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	3 Dokumen	291.614.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	138.085.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.702.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	827.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	4 Paket	145.954.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	49.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.114.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	58.465.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	2 Dokumen	135.980.800,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencanan Tahun 2026		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	9.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	126.180.800,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02	Program Penyelenggaraan LLAJ	Konektivitas Darat	66,20	2.979.209.200,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	250 Unit	1.957.433.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 Unit	1.918.738.500,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	38.695.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	75%	1.255.000,00	
2.15.02.2.03.0011	abilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1.255.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dokumen	253.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	253.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	100%	115.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5664	57.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5564	51.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	6.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1.250.000,00	
2.15.02.2.06.0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	5 Dokumen	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencanan Tahun 2026		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
		Umum			Umum
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disusun	1 Dokumen	643.942.700,00	Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	643.942.700,00	Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	64 Dokumen	1.075.000,00	
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	1.075.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	1 Dokumen	6.003.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.003.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	25,80%	89.525.000,00	
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	1 Dokumen	425.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	425.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	1 Dokumen	89.100.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.100.000,00	Dana Alokasi Umum
JUMLAH				8.463.983.240,00	

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan dokumen yang disusun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan daerah jangka menengah. Rencana kerja PD tahun 2026 ini akan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 – 2029 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 disusun mengacu kepada Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mempedomani Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor: 500.14.1/8645/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2025-2029 dan Renja-PD Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target PD serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renca Kerja PD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja PD Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana selanjutnya Renja PD Tahun 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, PD melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja PD tahun 2026 secara berkala serta melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi.
3. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan salah satu tahapan dalam mencapai keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan serta tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan, sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik.

